

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“It is time for British people to have their say. It is time to settle this European question in British politics. I say to the British people: this will be your decision. And when that choice comes, you will have an important choice to make about our country’s destiny” (Government, 2013)

Kutipan di atas merupakan sekelumit dari pidato yang dibawakan oleh mantan Perdana Menteri Inggris, David Cameron pada tahun 2013 dalam sebuah pertemuan Uni Eropa di Bloomberg. Lewat pidatonya, David Cameron memaparkan secara resmi bahwa Inggris memiliki keinginan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Selain itu, ia menyatakan bahwa masyarakat Inggris memiliki mandat yang sangat penting, yakni sebagai pemegang keputusan terhadap status keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Hal tersebut kemudian dimanifestasikan dalam sebuah referendum pada tanggal 23 Juni 2016.

Tanggal tersebut merupakan tanggal yang bersejarah bagi Inggris dan masyarakat Uni Eropa secara keseluruhan. Pada tanggal itu, berdasarkan hasil referendum, masyarakat Inggris memutuskan bahwa keluar dari keanggotaan Uni Eropa merupakan jalan terbaik bagi masa depan negeri Ratu Elizabeth tersebut. Hasil referendum menunjukkan bahwa 51.9% atau 17.410.742 masyarakat Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa, dan 48.1% atau 16.141.241 memilih untuk tetap berada di Uni Eropa. (BBC, EU Referendum Results 2016).

Sesungguhnya, Uni Eropa memiliki sebuah mekanisme prosedural dan legal bagi negara yang ingin keluar dari Uni Eropa. Mekanisme ini tercantum dalam artikel 50 *Treaty of the European Union* (lih. Lampiran 1). Dalam traktat tersebut, Uni Eropa menyatakan bahwa setiap negara anggota yang memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa harus mengikuti ketentuan konstitusional yang telah disepakati, hal ini mencakup laporan pada Dewan Uni Eropa dan kemudian akan dilakukan negosiasi dan perjanjian dengan negara yang bersangkutan serta harus disetujui oleh *qualified majority voting* dalam organisasi tersebut.

Namun, meskipun memiliki mekanisme yang telah diakui hukumnya, keputusan Inggris meninggalkan Uni Eropa merupakan momen mengejutkan dalam sejarah Uni Eropa sebagai sebuah organisasi regional yang menjadi percontohan bagi wilayah-wilayah lainnya. Pasalnya, tidak ada satu negara pun yang memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa sebelumnya. Fakta ini menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang mengambil keputusan untuk meninggalkan organisasi tersebut. Bertentangan dengan Inggris, banyak negara yang bahkan ‘mengemis’ untuk bisa masuk dalam skema organisasi Uni Eropa seperti Bosnia, Kosovo, Turki, dan Serbia yang sudah mengajukan proposal untuk bergabung.

Apabila melakukan napak tilas ke belakang, keinginan Inggris melepaskan keanggotaannya dari organisasi regional Uni Eropa—populer dengan istilah *Brexit* (*British* dan *Exit*)—bukanlah sesuatu yang baru muncul. Inggris pernah melakukan referendum mengenai status keanggotaannya pada organisasi yang dulu disebut sebagai *European Economic Community* tersebut pada tahun 1975. Pada saat itu, 67.2% masyarakat Inggris memilih untuk bertahan di dalam skema organisasi

(Roberts, 2015). Keputusan yang berbeda dipilih oleh masyarakat Inggris pada referendum pada tahun 2016.

Selain itu, keputusan meninggalkan Uni Eropa bukanlah sebuah keputusan prematur hasil pemikiran satu malam. Sebelum diadakannya referendum tahun 2016, Pemerintah dan Parlemen Inggris sendiri telah sejak lama melakukan berbagai inisiatif untuk mengkaji signifikansi peran dan dampak organisasi Uni Eropa pada Inggris. Salah satunya adalah proses audit yang disebut sebagai *Review of the Balance of Competences* yang merupakan sebuah hasil kajian mengenai relasi antara Uni Eropa dan Inggris pada tahun 2012.

Pada level masyarakat, berbagai lembaga survei yang berbasis di Inggris menerbitkan hasil survei yang menunjukkan bahwa masyarakat Inggris sendiri memiliki pandangan yang cukup dramatis terkait dengan status keanggotaan mereka di Uni Eropa sejak berpuluh tahun yang lalu. Salah satu survei paling awal digagas oleh lembaga *Gallup* yang menemukan fakta bahwa keikutsertaan Inggris dalam skema Uni Eropa pada tahun 1973 disikapi secara dingin oleh sebagian masyarakat Inggris dimana hampir 50% masyarakat menolak keputusan tersebut (Dearden, 2016). Pandangan tersebut terus mengalami fluktuasi hingga detik-detik terakhir diselenggarakannya referendum tahun 2016.

Bertolak belakang dengan pandangan masyarakat Inggris terhadap Uni Eropa, keanggotaan Inggris dalam skema Uni Eropa membawa banyak manfaat bagi negara tersebut, terutama dalam bidang perekonomian. Uni Eropa sebagai sebuah region yang memelopori kebebasan mobilisasi manusia, barang, jasa, dan

tenaga kerja menawarkan berbagai simplifikasi dalam perdagangan antar negara. Tarif, bea cukai, dan berbagai regulasi yang memperumit perdagangan dihapuskan sehingga interaksi ekonomi antar negara-negara Uni Eropa dipermudah. Manfaat ini juga dirasakan oleh Inggris. Berbagai perusahaan dan industri Inggris menyatakan bahwa mereka diuntungkan dengan keanggotaan Inggris dalam skema pasar tunggal dan perjanjian pasar bebas di Uni Eropa. Berdasarkan data dari *Center for Economics and Business Research* yang dirilis pada Oktober 2015 menunjukkan bahwa 3.25 milyar lapangan pekerjaan di Inggris terhubung dengan mekanisme Uni Eropa (Center for Economic and Business Research 2016). Di bidang pertanian dan agrikultur, petani-petani Inggris menikmati subsidi sebesar 3.1 milyar euro melalui program Uni Eropa bernama *Common Agricultural Policy* yang mencakup 55% total pendapatan mereka (Gosden, 2016).

Pada sektor keamanan, Inggris sangat bergantung pada kerjasama kooperatif dengan negara-negara Uni Eropa untuk melindungi teritorialnya dari problematika terorisme dan *human trafficking* yang saat ini sangat marak di wilayah Uni Eropa. Tanpa adanya kerjasama tersebut, Inggris harus memutar otak untuk dapat membendung kawasannya tanpa bantuan Uni Eropa. Sementara di bidang pengembangan ilmu pengetahuan sains, Inggris memperoleh curahan dana yang cukup besar. Berdasarkan analisis dari *The Royal Society*, Inggris memperoleh dana sebesar 8.8 milyar euro dari Uni Eropa meskipun hanya membayar 5.4 milyar euro pada sektor tersebut pada periode 2007-2013 (Frenk, Hunt, Patridge, Thorton, & Wyatt, 2016).

Sementara itu referendum ini memperoleh respon yang beragam dari berbagai pihak, umumnya banyak yang menyayangkan keputusan masyarakat Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama menyatakan bahwa Uni Eropa membutuhkan Inggris untuk dapat menyelesaikan permasalahan imigran, terorisme, dan krisis ekonomi yang saat ini dialami oleh organisasi regional tersebut. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat dan negara-negara di dunia membutuhkan Inggris untuk memperlebar pengaruhnya di dalam maupun di luar Uni Eropa. Kanselir Jerman, Angela Merkel mengatakan bahwa dirinya menginginkan Inggris sebagai bagian penting dan anggota aktif dari Uni Eropa (Mason, Waterfield, & Govan, 2013). Sementara itu, Juru Bicara Presiden Perancis Francois Hollande, Najat Vallaud-Belkacem, menyatakan bahwa Hollande secara jelas telah berharap agar Inggris tetap berada di Uni Eropa, namun ia tetap memperingatkan bahwa setiap anggota Uni Eropa harus menerima serangkaian kewajiban yang harus dipenuhi (BBC, Cameron referendum speech: EU reaction, 2013).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka didapat sebuah pokok permasalahan: “Mengapa masyarakat Inggris memilih untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa dalam referendum tahun 2016?”

C. Kerangka Berpikir

1. Konstruktivisme

Inti utama dari teori konstruktivisme adalah sebuah pemikiran bahwa segala sesuatu yang ada di dunia bukanlah sesuatu yang *given* (tercipta dengan sendirinya) melainkan adalah hasil konstruksi manusia secara sosial (Jill Steans, 2005). Hal ini berbeda dengan pendapat realis dan neorealis (positivis) yang menyatakan hal sebaliknya. Pendekatan konstruktivisme secara sosial yang empiris ini sangat berbeda dengan pendekatan kaum positivis yang mengagungkan pendekatan mekanis atau material. Menurut konstruktivisme, sistem internasional merupakan sebuah entitas yang dilihat secara material seperti distribusi kekuasaan yang dilihat melalui kekuatan militer atau ekonomi serta perilaku negara yang dilihat dalam skema perimbangan kekuasaan. Selain itu, sistem yang terdiri atas ide-ide, kepercayaan, dan nilai-nilai yang diakui bersama memiliki karakteristik struktural yang memiliki pengaruh yang luar biasa pada aksi sosial dan politik (Reus-Smit 2005).

Pandangan ini berangkat pada kenyataan bahwa sistem internasional bukanlah sebuah entitas fisik namun sebuah entitas yang berdiri dan dikonstruksikan berdasarkan kesadaran intersubjektivitas atau kesepakatan bersama. Oleh karena itu, studi hubungan internasional harus dititikberatkan pada norma, nilai, ide, dan kepercayaan yang diakui dan melandasi perilaku dan interaksi aktor-aktor yang bergelut didalamnya. Konstruktivisme menekankan pentingnya nilai-nilai dan kepentingan bersama oleh individu-individu yang Alexander Wendt deskripsikan sebagai hubungan antara agen (individu) dan struktur. Struktur tidak

hanya membatasi agen, namun juga mengkonstruksikan identitas dan kepentingan mereka. Selain itu, inti dari konstruktivisme menekankan esensi hubungan internasional yang muncul sebagai akibat dari interaksi antar agen-agen tersebut. Hal ini dapat dipahami karena negara tidak berinteraksi, melainkan agen-agen dari negara tersebut yang berinteraksi (McGlinchey 2016).

Konstruktivisme memiliki tiga preposisi teoritis utama: Pertama, konstruktivisme menyatakan bahwa struktur material seperti yang dipercaya oleh neorealis dan liberalis saat ini terdiri atas, dan sama pentingnya dengan struktur non material (ide, nilai, dan kepercayaan yang dianut secara umum). Struktur non material inilah yang memberikan 'arti' pada struktur material dan mempengaruhi kebijakan sosial dan politik suatu negara. Kedua, memahami bagaimana struktur non material mengkondisikan identitas negara sangatlah penting, karena identitas negaralah yang diproyeksikan sebagai kepentingan dan kebijakan nasional. Ketiga, agen dan struktur merupakan dua bagian yang tak terpisahkan antara satu dan lainnya. Struktur non material dapat mempengaruhi identitas dan kepentingan aktor hanya apabila aktor memahami dan mengimplementasikannya dalam serangkaian kebijakan (Reus-Smit 2005).

Pada tahun 1990-an ketika konstruktivisme mulai mendapatkan tempat dalam berbagai diskursus hubungan internasional, terbentuklah tiga tipe konstruktivisme: tipe konstruktivisme sistemik, konstruktivisme level unit, dan konstruktivisme holistik (Reus-Smit, 2005). Penulis akan berfokus pada konstruktivisme tipe kedua guna menjelaskan kaitan antara struktur non material yang ada dengan keputusan masyarakat Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

a. Konstruktivisme Level Unit

Tipe konstruktivisme ini lebih memfokuskan pada hubungan antara dinamika domestik, norma hukum, identitas, dan kepentingan nasional suatu negara. Tipe ini merupakan bentuk penyempurnaan dari konstruktivisme sistemik yang menekankan pada interaksi antar negara dalam domain internasional. Dalam konstruktivisme sistemik, interaksi antar negara menghasilkan identitas dan kepentingan nasional suatu negara. Berlawanan dengan hal tersebut, Peter Katzenstein menyatakan bahwa konstruktivisme sistemik tidaklah cukup karena di dalamnya tidak mencakup dinamika domestik yang mempengaruhi perilaku negara dalam sistem internasional. Penekanan dalam analisis Katzenstein bertumpu pada struktur normatif domestik berupa nilai, kepercayaan, dan ide yang mempengaruhi identitas, kepentingan, dan kebijakan suatu negara (Jackson & Sorensen, 2006).

Ted Hopf menyatakan bahwa meskipun analisis politik internasional menggunakan teorisasi sistemik, namun sebenarnya politik internasional tidak memiliki sistem yang lebih berkuasa dibanding yang lain melainkan bercabang-cabang dan sama pentingnya. Oleh karena itu untuk memperoleh pemahaman mengenai interaksi antar negara, memahami dinamika domestik negara sangatlah penting, karena “...*who are enemies and friends begins at home*” (Hopf, 1998). Melalui kaca mata konstruktivisme level unit ini, kajian mengenai struktur non material dan dinamika interaksi domestik yang kemudian berkontribusi membentuk identitas negara akan membantu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kepentingan suatu negara.

Pada dinamika masyarakat Inggris, terdapat unsur struktur normatif domestik yakni adanya nilai-nilai dan kepercayaan yang mengkonstitusikan identitas bersama sebagai seorang *british* (orang Inggris) yang berhubungan dengan paradigma yang disebut sebagai *euroscpticism*.

Britishness adalah istilah yang mengacu pada karakteristik yang membedakan masyarakat Inggris dan merupakan basis dari persatuan dan identitas mereka. Pada tahun 2005, surat kabar *The Telegraph* menerbitkan artikel yang disebut sebagai 10 nilai-nilai fundamental dari identitas seorang *british* sebagai sebuah elemen dalam situs web yang disebut sebagai *Call Yourself Britishness Campaign* (The Telegraph 2005). 10 Nilai-nilai ini menjadi salah satu pembahasan dalam debat di *House of Lords* dalam rangka mendefinisikan istilah *britishness*. Nilai-nilai ini melingkupi:

1. Aturan hukum. Masyarakat Inggris dicerminkan dengan adanya penghormatan yang sama terhadap aturan hukum tanpa membedakan status maupun tingkat masyarakat. Tidak ada satu entitas pun yang memiliki derajat di atas aturan hukum, bahkan pemerintah sekalipun.
2. Kedaulatan parlemen. *House of Lords* dan *House of Commons* mengkonstitusikan otoritas luar biasa di Inggris. Banding terhadap dua cabang parlemen ini tidak berlalu baik secara spritual maupun temporal.
3. Negara yang pluralis. Kesetaraan dalam hukum mengimplikasikan bahwa tidak ada seorang pun yang diperlakukan berbeda terkait dengan keanggotaannya dalam suatu kelompok. Setiap kelompok, sekte,

kepercayaan, dan ideologi wajib memiliki toleransi terhadap eksistensi pihak yang memiliki pandangan berlawanan.

4. Kebebasan individu. Dugaan melawan indikasi kekerasan oleh negara harus selalu ada serta menciptakan suasana toleransi yang kemudian mencapai tahap dimana tidak ada hak masyarakat yang direnggut.
5. Adanya penghormatan terhadap kebebasan kepemilikan barang pribadi. Kebebasan melingkupi kebebasan menjual dan membeli tanpa adanya kekhawatiran terhadap penyitaan, perpindahan hak milik, dan penandatanganan dan implementasi kontrak. Inggris menjadi negara yang paling awal mengenal sistem ini dan kemudian menjadi salah satu negara yang paling makmur di dunia.
6. Institusi yang ada di Inggris. Kebebasan dan karakter masyarakat Inggris tercermin dalam institusi yang ada di Inggris.
7. Keluarga sebagai lembaga yang mewariskan budaya *britishness*. Adanya nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi yang merupakan aspek esensial dari terciptanya masyarakat yang stabil.
8. Sejarah. Penduduk usia muda di Inggris merawisi budaya politik, seperangkat hak dan kewajiban, serta kebanggaan tersendiri atas pencapaian negara tersebut.
9. Bahasa Inggris yang menjadi simbol anglosfer dan mencerminkan masyarakat yang percaya terhadap kebebasan, keadilan, dan aturan hukum.

10. Karakter masyarakat Inggris yang dibentuk dan membentuk institusi nasional yang dikenal sebagai masyarakat yang keras kepala, tabah, dan murka terhadap ketidakadilan.

Britishness ini membedakan masyarakat asli Inggris dengan masyarakat yang berasal dari negara lainnya. Adanya identitas sebagai seorang *british* ini mengakibatkan terbentuknya kepentingan politik tersendiri pada masyarakat Inggris.

Euroscepticism sendiri adalah sebuah pandangan yang mengakar di masyarakat terkait dengan keikutsertaannya dalam organisasi Uni Eropa. Istilah *euroscepticism* sendiri merupakan istilah yang cukup baru. Istilah ini belum digunakan pada tahun-tahun awal berdirinya *European Communities* (sebutan awal bagi Uni Eropa). Pada masa itu, publik Inggris menggunakan istilah yang disebut sebagai *anti-markeeters* yang merupakan sikap kontra bagi pembentukan pasar tunggal. *Euroscepticism* sendiri muncul pada konteks yang sangat spesifik di Inggris yakni pada perdebatan terkait dengan *European Communities*. Istilah ini pertama kali tercantum pada harian *The Times* pada pada tahun 1985 (Leconte, 2010).

Euroscepticism menjadi cukup populer setelah Margaret Thatcher menggunakannya dalam pidato terkenalnya, *Bruges Speech*, yang menjadi salah satu acuan bagi para *eurosceptic* hingga saat ini. Istilah ini semakin digunakan secara luas di seluruh benua Eropa pada era proses ratifikasi *Maastricht Treaty*. Lambat laun, *euroscepticism* menjadi sebuah istilah yang mewakili semua istilah yang mendeskripsikan segala oposisi dan keberatan pada Uni Eropa. Meskipun

istilah ini digunakan di berbagai negara Eropa, namun definisi *euro scepticism* sangat terikat dengan konteks hubungan dan oposisi negara tersebut dengan Uni Eropa. Pada kasus *euro scepticism* yang ada di Inggris sendiri sangat berhubungan dengan aspek kultural anti-Eropa dan secara spesifik merupakan bentuk penolakan pada konsep *European Superstate* dan *Economic and Monetary Union (EMU)* (Leconte, 2010)

Euro scepticism atau keraguan terhadap organisasi regional Uni Eropa pada dasarnya menolak integrasi Uni Eropa dalam spektrum politik. Dalam dinamika perpolitikan antar negara-negara Uni Eropa, *euro scepticism* membayangi eksistensi organisasi Uni Eropa sebagai sebuah konsep yang melawan prinsip integrasi. Para elit Eropa umumnya merupakan pihak yang sangat mendukung perkembangan Eropa. Namun, seiring berjalannya waktu, menjaga Uni Eropa yang terintegrasi menjadi semakin sulit. Hal ini dapat dilihat dari munculnya *euro scepticism* yang terlihat dan terkonstruksi melalui opini publik di berbagai negara anggota (Taggart and Szczerbiak, 2002).

Euro scepticism di Inggris sendiri dapat dibuktikan melalui survei opini publik tersebut. Berbagai hasil survei tersebut memperlihatkan bahwa adanya kepercayaan publik bahwa keanggotaan Uni Eropa bukanlah sesuatu yang baik (Sutcliffe, 2010). Berdasarkan survei *Eurobarometer*, Inggris merupakan selalu konsisten menjadi negara yang *euro sceptic* dibandingkan negara-negara Uni Eropa lainnya (Stylianou, 2014). Selain itu, Inggris sering disebut sebagai *awkward partner* dalam proses integrasi dan hubungan spesialnya dengan Amerika Serikat

yang kerap kali menyebabkan ketegangan di dalam organisasi Uni Eropa (Coxall, Robins, & Leach, 2003).

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan *Oxford English Dictionary*, *euroseptic* adalah ‘seseorang yang yang memiliki keraguan dan keberatan terkait dengan manfaat keikutsertaan negara anggota di organisasi regional Uni Eropa.’ Sementara itu, Aleks Szczerbiak dan Paul Taggart mendefinisikan *eurosepticism* mengekspresikan sebuah ide mengenai penolakan secara masal terkait dengan konsep integrasi Eropa. Mereka membagi *eurosepticism* ini menjadi dua bagian, yakni *eurosepticism* keras dan *eurosepticism* lemah.

Eurosepticism keras didefinisikan sebagai sebuah oposisi terhadap Uni Eropa dan konsep integrasi Uni Eropa yang dapat dilihat pada partai politik (atau pada masyarakat) yang menganggap bahwa negara mereka harus menarik diri dari keanggotaan, atau kebijakannya terhadap Uni Eropa dianggap berseberangan dengan seluruh proyek Uni Eropa yang dipahami selama ini.

Sementara itu, *eurosepticism* lemah didefinisikan sebagai oposisi terhadap satu atau beberapa kebijakan Uni Eropa atau adanya kekhawatiran terhadap kepentingan nasional dan kedaulatan yang dipertaruhkan dalam skema Uni Eropa tanpa bersikap negatif pada ide integrasi tersebut.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan, maka di dapat dua hipotesis bahwa alasan masyarakat Inggris memilih keluar dari keanggotaan Uni Eropa pada referendum tahun 2016 adalah:

1. Masyarakat Inggris merasa bahwa identitas nasional mereka semakin terancam dengan keanggotaan mereka di Uni Eropa.
2. Masyarakat Inggris menilai bahwa banyak kebijakan Uni Eropa yang bertentangan dengan norma dan nilai yang dimiliki oleh masyarakat Inggris sehingga menyebabkan adanya anggapan bahwa keanggotaan Uni Eropa tidak lagi bermanfaat.

E. Batasan Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis akan memaparkan alasan masyarakat Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa dengan menjabarkan dinamika hubungan antara Inggris dan Uni Eropa dari awal pembentukan organisasi regional Uni Eropa hingga munculnya hasil referendum ini. Penulis mengkhususkan penelitian terbatas pada dinamika masyarakat di Inggris saja, tidak memasukkan dinamika masyarakat negara-negara Britania Raya seperti Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales maupun negara persemakmuran Inggris seperti Gibraltar yang mengikuti referendum tahun 2016. Selain itu, untuk mempertajam analisis, penulis akan memaparkan pengaruh dan peranan masyarakat Inggris dalam keanggotaan Inggris di Uni Eropa.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka guna mengumpulkan data-data sekunder yang berupa informasi-informasi yang berada dalam literatur-literatur yang relevan dengan topik yang diambil oleh penulis. Teknik pengumpulan data bersifat kualitatif dimana penulis mendapatkan data penelitian dari buku, jurnal, berita, pidato, dan internet.

Tujuan penelitian ini bersifat analitik dimana penulis berusaha untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan ‘mengapa’ dengan menghubungkan antara fakta yang ada dengan fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode kualitatif.

G. Sistematika Penelitian

Pada Bab I penulis akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, teori/kerangka berpikir, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II penulis akan memaparkan mengenai sejarah singkat terbentuknya Uni Eropa yang dikaitkan dengan keterlibatan dan partisipasi Inggris. Selain itu, penulis juga akan memaparkan mengenai pandangan masyarakat Inggris terkait dengan hubungan negaranya dengan Uni Eropa dari tahun ke tahun.

Pada Bab III penulis akan memaparkan mengenai proses Inggris dari awal wacana untuk keluar dari Uni Eropa hingga munculnya hasil referendum yang menjadi basis legal mundurnya Inggris dari Uni Eropa.

Pada Bab IV penulis akan memaparkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Inggris memilih untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa dalam referendum 2016.

Pada Bab V penulis akan memaparkan mengenai kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.